



ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Diah Hanifah Daulay¹, Andin Charisa Salwa²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ diahhanifahd@gmail.com

ABSTRACT

This research is the result of a literature review on Islamic economic thought in Indonesia. This research is explained by the main figures namely H.O.S. Tjokroaminoto who represents the pre independence era, Sjafruddin Prawiranegara for the Old Order period, and A.M Saefuddin for the New Order period. Islamic economics is an economic system that runs based on the provisions of sharia and makes the Qur'an and As-Sunnah as the main legal reference source, this system develops from era to era, as well as from the time of the Prophet Muhammad Saw until the time of Islamic economic thought of Muslim scholars.

Keywords

Thoughts, Economic, Indonesia



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi sepanjang yang diketahui dimulai sejak jaman Yunani Kuno. Dari sinilah kata ekonomi berasal, yaitu dari penggabungan dua suku kata Yunani oikos dan nomos yang berarti pengaturan atau pengelolaan rumah tangga. Pada masa Yunani Kuno pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian dari filsafat. Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

Meskipun ilmu ekonomi belum berusia lebih dari dua abad, pembahasan dan analisis tentang masalah ekonomi telah berlangsung lama. Ekonomi, sebagaimana dikenal saat ini, mulai terbentuk di Eropa selama abad kedelapan belas. Namun, analisis ekonomi memiliki garis keturunan yang lebih panjang. Analisis ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan para filsuf Yunani kuno, cendekiawan Islam, aliran abad pertengahan, dan Merkantilis abad keenam belas dan ketujuh belas.

Pemikiran ekonomi pada mulanya muncul dari upaya masyarakat untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi. Dengan begitu, ekonomi

dipraktikkan jauh sebelum teori ekonomi muncul. Manusia memikirkan permasalahan ekonomi secara inklusif, dalam masyarakat tertutup atau bersama dengan kelompok lain, dan dipengaruhi oleh pemikiran dan gagasan mereka. Interaksi dan konvergensi pemikiran memberikan dasar yang diperlukan untuk kesinambungan ilmu dan pengembangan ide. Dengan demikian, ekonomi berevolusi secara historis dari banyak pikiran manusia dan pemikiran ekonomi adalah akumulasi pengetahuan manusia dalam upaya memecahkan masalah ekonomi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode tinjauan literatur. Penelitian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis referensi seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia

Gagasan tentang ekonomi Islam di Indonesia telah muncul sejak awal abad 20 ketika Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI). Pendirian SDI ini mengisyaratkan keinginan umat merealisasikan ajaran ekonomi menurut Islam dan sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda dan kompetisi perdagangan Cina. Sistem ekonomi yang dikembangkan kolonialisme Belanda saat itu merepresentasikan sistem ekonomi Kapitalis, yang dalam banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam.

Pemikiran ekonomi Islam memiliki corak pemikirannya yang khas pada jaman yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh suasana jaman ketika pemikiran itu dilontarkan. Pemikiran ekonomi Islam di masa Pra-Kemerdekaan dan masa Orde Lama memiliki corak yang berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru. Demikian juga pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pasca Orde Baru berakhir.

Di zaman Pra-Kemerdekaan dan Orde Lama pemikiran ekonomi Islam di Indonesia lebih dekat kepada ideologi kiri. Hingga muncul istilah "Sosialisme Religius", suatu istilah yang dipakai oleh H.O.S Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara untuk membedakan dengan Sosialisme Marxis. H.O.S Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara berupaya untuk mempertemukan gagasan-gagasan sosialisme dengan ide-ide ke-Islaman dalam konteks Indonesia.

Sementara itu, pada masa Orde Baru bermunculan pemikiran-pemikiran tandingan (counter ideas) terhadap pemikiran Orde Lama. Dalam pandangan pendukung Orde Baru, orientasi pemikiran sosial-politik Orde Lama dianggap bersifat ideologis dan politis (Emil Salim : 2005, 66 67) Persoalan-persoalan praktis namun secara langsung bisa mengatasi masalah-masalah kebutuhan rakyat banyak tidak diperhatikan. Oleh para pendukung Orde Baru, pola pemikiran sosial-politik Orde Lama dianggap menjadikan "politik sebagai panglima". Pada masa Orde Baru ini pemikiran-pemikiran yang mengemuka dan menjadi program kerja pemerintah adalah persoalan pembangunan.

Saat ini, kondisinya berbeda. Perkembangan gagasan atau pemikiran ekonomi Islam sudah menapaki tahap discourse karena telah memasuki tahap institusionalisasi gagasan dan tahap regulasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tingkat nasional dan kebijakan ekonomi pembangunan. Ditengah maraknya industri perbankan syariah, pemikiran ekonomi Islam yang muncul merupakan pemikiran-pemikiran yang sedikit banyak menjadi penyangga industri tersebut atau berupa pemikiran yang mengkritik operasional perbankan syariah yang dianggap lari dari cita-cita ekonomi Islam dan tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional.

Sosial-Politik: Era Pra- Kemerdekaan

Peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme maupun Islam bisa dilihat dari kebangkitan kesadaran politik berbangsa di awal abad 20. Beberapa studi menyimpulkan dua faktor yang turut mempengaruhi munculnya kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme dalam masyarakat Islam di Indonesia, yaitu adanya gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah dan munculnya sekelompok elit intelektual Indonesia hasil dari Politik Etis.

Politik Etis disebabkan oleh adanya pergeseran perpolitikan di Belanda yang tidak hanya berpengaruh pada kebijakan ekonomi, tapi juga kebijakan sosial pemerintah Hindia Belanda. Politik etis merupakan program balas budi pemerintah Belanda yang difokuskan pada tiga bidang, yaitu irigasi, transmigrasi dan pendidikan. Melalui program-program politik etis ini, dibangun sistem irigasi dan sekolah-sekolah modern di sejumlah daerah (Boediono : 2016, 56) Dari ketiga program itu, pendidikan dianggap hal yang paling esensial. Kebijakan pendidikan ini mempunyai dampak penting dalam kehidupan penduduk Hindia Belanda. Program-program pendidikannya menebarkan benih-benih kesadaran politik sehingga membentuk kelompok elit pelajar Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme.

Perkembangan paling penting dari bangkitnya kesadaran nasionalis dikalangan pribumi Hindia Belanda adalah munculnya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Perhimpunan ini didirikan oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang

batik lokal yang berlatar Sekolah Pribumi Kelas Dua (Tweede Klasse School) dan dibantu oleh Tirto Adhi Surjo dalam merumuskan statutenya (Yudi Latif : 2013, 182).

SI diawal pendiriannya memiliki tujuan dalam membela para pedagang Muslim lokal menghadapi para pesaing keturunan Cina dalam industri batik di Jawa Tengah. Lahirnya SI merupakan titik yang menentukan dalam perkembangan ide kebangsaan Islam sebagai bentuk perhimpunan nasionalis. Bergesernya tujuan SI dari ekonomi ke arah politik dimulai tahun 1914 ketika Tjokroaminoto menggantikan peran Haji Samanhudi sebagai ketua. Di bawah kepemimpinannya, tujuan SI yang pada awalnya menekankan pemberdayaan para pedagang Muslim bergeser pada advokasi umum tentang hak-hak ekonomi dan sosio-politik masyarakat pribumi secara luas. SI mulai mengadopsi sebuah ideologi populis sehingga jumlah anggotanya bertambah semakin cepat.

Namun kondisi SI yang kian membesar menjadikannya sebagai perhimpunan yang menarik perhatian bagi para oportunis politik yang memiliki ideologi berbeda. Diantaranya adalah ISDV yang sukses menginfiltrasi ideologi Marxis-Leninis ke dalam tubuh SI. Sebagai respon terhadap menguatnya daya tarik ideologi komunisme baik di luar maupun di dalam perhimpunan tersebut, para intelektual yang berorientasi Islam berupaya memunculkan sebuah ideologi tandingan. Pengaruh dari para intelektual kiri dan doktrin-doktrin sosialis bagi rakyat terjajallah yang menstimulus para intelektual Islam untuk mengombinasikan antara pandangan-pandangan doktrin Al-Qur'an yang progresif dengan ide-ide sosialis tertentu. Kombinasi ini dikenal sebagai "Sosialisme Islam". Ideologi baru ini dikobarkan oleh kelompok modernis Islam termasuk Tjokroaminoto, Agus Salim, Abdul Muis dan Surjopranoto.

Era Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia berada pada situasi yang buruk. Faktor-faktor yang menyebabkan buruknya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu diantaranya, pertama, terjadinya inflasi yang sangat tinggi (hyperinflation) yang disebabkan oleh peredaran uang yang terlalu banyak. Pada saat itu Republik Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan tiga mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu Javanische Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang. Kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda mulai Bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan komoditi. Belanda memperhitungkan pemerintah RI akan segera jatuh mengingat kondisi kas negara yang kosong dan pengeluaran yang meningkat. Ketiga, lumpuhnya ekonomi akibat eksploitasi masa penjajahan

sebelumnya khususnya pada masa pendudukan Jepang dimana seluruh kegiatan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan perang.

Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, hubungan Islam dengan pemerintah Soeharto mengalami masa pasang dan surut. Diawal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru yang dikuasai oleh militer mengambil kebijakan untuk melumpuhkan dan menjinakkan tiga kekuatan politik utama dalam ruang publik Orde Lama, yaitu memberangus PKI, melumpuhkan PNI dan menolak rehabilitasi Masyumi. Penyingkiran terhadap ketiga bekas kekuatan politik di masa Orde Lama itu dianggap sebagai titik pijak yang penting bagi dimulainya suatu tatanan politik baru, Jargon Orde Lama "politik sebagai panglima" dianggap pemerintah Orde Baru telah mengabaikan persoalan-persoalan mendasar, yaitu kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pemerintah Orde Baru melakukan pemulihan ekonomi dengan mengalihkan perhatian rakyat dari politik kepada ekonomi.

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang diwarisinya, yaitu hiperinflasi dan stagnasi, pemerintah Orde Baru menyusun program stabilisasi ekonomi yang disebut Paket Oktober 1966 - yang memiliki fokus pada empat hal, yaitu menghilangkan aturan-aturan yang memasung kegiatan normal ekonomi, mendisiplinkan kembali anggaran negara, memfungsikan kembali kebijaksanaan moneter sebagai alat pengendali uang beredar dan melonggarkan ketersediaan devisa yang mencekik kegiatan ekonomi, Langkah-langkah pemulihan kondisi ekonomi membutuhkan stabilitas politik. Alasan ini memberikan justifikasi untuk menyingkirkan apa saja yang dianggapnya sebagai hambatan. Untuk mengamankan jalannya pembangunan, stabilitas politik menjadi yang utama. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Orde Baru menggunakan beragam cara represif untuk mengekang kebebasan berbicara dan berkumpul, dan juga oposisi politik dan kritik intelektual karena semua itu dianggap sebagai ancaman- ancaman yang serius bagi stabilitas politik.

Ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh kekuatan politik dan organisasi masa oleh pemerintah Orde Baru menandai format baru gerakan Islam selanjutnya. Ciri yang mendasari wajah baru Islam tersebut bahwa orientasi gerakan Islam bukan lagi didominasi oleh kekuatan institusi politik, melainkan lewat lembaga- lembaga sosial, ekonomi dan budaya, yang ditopang oleh para intelektual Muslim. Tujuan Islam bukan diorientasikan kepada kekuasaan melainkan lebih diarahkan kepada dakwah dan pencerahan umat dalam pembangunan bangsa.

Hal ini berpengaruh terhadap pemikiran maupun kebijakan politik pemerintah serta bagi umat Islam sendiri. Pengaruh yang nyata adalah terjadinya akomodasi timbal balik (mutual accomodation) antara Islam dan

birokrasi Orde Baru. Bentuk riil dari saling mengakomodasi itu adalah pemenuhan berbagai aspirasi umat Islam dan respon yang lebih partisipatif terhadap beberapa kebijakan Orde Baru.

Salah satu bentuk nyata dari mesranya hubungan timbal balik tersebut adalah berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada 7 Desember 1990. Berdirinya ICMI dapat dipandang sebagai berakhirnya kecurigaan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam di Indonesia. Berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga merupakan inisiatif dari para cendekiawan Muslim yang bernaung di dalam ICMI.

KESIMPULAN

Meskipun para tokoh hidup dalam jaman yang berbeda, namun konstruksi nilai-nilai filosofi Islam dalam pemikiran ekonomi mereka memiliki kesamaan. Tauhid menjadi inti dari semua nilai, di mana semua kegiatan ekonomi tunduk pada nilai filosofi ini. Untuk tercapainya tujuan ekonomi Islam, para tokoh menetapkan nilai-nilai filosofis Islam yang dijadikan prinsip atau acuan. Nilai-nilai yang muncul dari ketiga tokoh di atas, yakni nilai persaudaraan, nilai persamaan dan kebersamaan, nilai keadilan, dan nilai keselamatan. Nilai-nilai tersebut membentuk suatu sistem nilai yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa aspek ekonomi dengan berbagai cakupan bahasannya seperti mengenai kepemilikan, riba dan bunga serta zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan, merupakan bagian yang integral dari sistem ajaran Islam yang komprehensif. Namun, ketika berbicara tentang seperti apa metode yang harus dibangun antara Islam dan ekonomi, terutama yang menyangkut kondisi riil, terdapat perbedaan-pendekatan di kalangan para tokoh tersebut di atas. Meskipun timbul berbagai perbedaan pemikiran, namun yang harus dicatat adalah kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masalah. Perbedaan-perbedaan tersebut justru semakin memperkaya khasanah keilmuan ekonomi Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qoyum Karim, A. A., Masruroh, I., & Indonesia, T. I. (2002). Sejarah pemikiran ekonomi Islam
- Aji, C. B., Yafiz, M., & Sukiati, M. A. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari*
- As' adurrofik, M. (2021). Sejarah Peradaban Islam Tiga Kerajaan Besar. *AL-Fathonah*, 1(1), 188-209.
- Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa

- Khalifah Umar Bin Al Khathab. HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1).
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Fajri, M. Z. N., ... & Mubarrok, U. S. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
- Huda, F. (2020). Pemikiran pendidikan islam pada masa nabi & khulafaurrasyidin. Kutubkhanah, 20(2), 137-151.
- Indasari, D. (2017). Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni, 9(2), 55-60.
- Izzati, S. A., & Rofiah, K. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maqrizi dan Aplikasinya di Era Modern. Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 5(01), 36-49
- Kurniawan, R. R. Risman Hidayat_Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa 3 Kerajaan Besar.
- Lubis, M. A., SE, S., Husna, A., Ak, S., Ak, M., Hanum, F., & Ak, M. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. umsu press.
- Qoyum, A. (2021). Sejarah pemikiran ekonomi Islam.
- Rahmadi, T. (2021, December). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Periode Khalifah Utsman Bin Affan dan Periode Ali Bin Abi Thalib). In Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS) (Vol. 1, No. 1).
- Saprida, M. H. I. (2021). Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Prenada Media
- Shadat, N., & Alimni, A. (2023). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4), 4238-4259.